

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

(HA.008.DL.401180)



Pengadilan Agama Surakarta

Tahun 2022

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana amanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Surakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Surakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, 30 Juni 2022  
Ketua Pengguna Anggaran,



Sambudi, S. Ag., M.Si.  
NIP.19750322 199803 1 003

## **PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

Jl. Veteran No. 273 Surakarta - Jawa Tengah 57155  
Telp. (0271) 634270 Fax. (0271) 643643 e-mail : pasurakarta@gmail.com

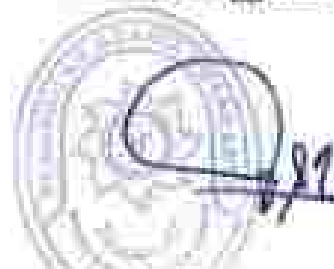
---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan iniya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surakarta, 30 Juni 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**Sambudi, S. Ag., M.Si.**  
**NIP 19750322 199803 1 003**

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	1
Pernyataan Tanggung Jawab	2
Ringkasan	3
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	10
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI. Lampiran dan Daftar	35

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 1 Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- atau mencapai 100 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester 1 Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 5,066,154,660,- atau mencapai 51,89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9,763,975,00,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 19,718,038,869,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 49,747,976,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp 19,668,310,893,- Piutang Jangka Panjang (bruto) sebesar Rp 0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1,233,783,530,- dan Rp 18,484,275,339,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp (6.300.764.412,-) sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (6.300.764.412,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (6.300.764.412)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 19.718.875.091,- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp 6.300.764.412,- kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0, koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 5.066.164.660,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 18.484.275.339,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**L. ESPORAN REALISASI ANGGARAN**

**PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022		% thd Angg	TA 2021 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	R.1	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>0,00</b>	
<b>BELANJA</b>					
Belanja Transaksi	B.1	5.763.975,000	5.066.164,660	87,89	0
Belanja Pegawai	B.3	3.455.858,000	4.209.531,408	121,76	0
Belanja Modal	B.4	64.000,000	64.000,000	100,00	0
Belanja Barang		1.240.317,000	792.635,362	63,91	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>10.724.150,000</b>	<b>10.132.331,430</b>	<b>94,47</b>	

**II. PERIODE**

**PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
 NERACA  
 PER 30 JUNI 2022 DAN 2021**

		(Dalam Rupiah)	
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C10	4.900,220	4.900,220
Aset Lain-Lain	C11	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C12	(4.900,220)	(4.900,220)
Jumlah Aset Lainnya			
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>19.718,058,869</b>	<b>19.727,607,168</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C13	1.199.133,008	8.732,075
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.200,783,120	8.732,075
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.200,783,120</b>	<b>8.732,075</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C14	18.484,275,339	19.718,875,091
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>18.484,275,339</b>	<b>19.718,875,091</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>19.718,058,869</b>	<b>19.727,607,168</b>



**III LAPORAN OPERASIONAL**

**PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
 LAPORAN OPERASIONAL  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021**

URAIAN	CATATAN	(Dalam Rupiah)	
		2022	2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			495.000
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	6.289.294.021	
Beban Persediaan	D.3	24.587.044	
Beban Barang dan Jasa	D.4	528.274.025	
Beban Pemeliharaan	D.5	223.434.000	
Beban Perjalanan Dinas	D.6	46.547.800	
Beban Barang untuk Diteruskan kepada Masyarakat	D.7		1.100.000.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	111.220.441	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
<b>JUMLAH BEBAN</b>		6.995.764.311	
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		(6.500.764.311)	
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus/Perbaikan Aset Non Lancar			
Defisit/Perbaikan Aset Non Lancar			
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		(6.500.764.311)	
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PLBP			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		(6.500.764.311)	

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021**

URAIAN	CATATAN	(Dalam Rupiah)	
		2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	19.718.875,091	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(6.306.764,412)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESELAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	1.051,225
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Perolehan		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Salah Revaluasi Aset		-	1.138,000
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		-	84,775
LAIN-LAIN	E.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	1.066.168,660	8.852.805,422
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(1.234.599,752)	15.980,945
EKUITAS AKHIR	E.8	18.488.275,339	15.539.910,121

## KEGATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Surakarta

*Dasar Hukum,  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Tahun 2022 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Surakarta

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Surakarta sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Surakarta adalah :

"Tereujudnya Peradilan Yang Agung dan Berwibawa Berdasarkan Putusan Yang Adil Sehingga Tercipta Kehidupan Masyarakat Yang Tertib dan Damai"

Misi Pengadilan Pengadilan Agama Surakarta adalah :

- Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan, Perkara-Perkara yang Diajukan Oleh Umat Islam Atau di Luar Islam yang Memundukan diri di Hukum Islam Bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Sedaqah, dan Ekonomi Syariah Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan'

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Surakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Surakarta setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme pelaksanaannya berupa pelaporan serta pengawasannya.
2. Pengadilan Agama Surakarta setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas (job description) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Ketua Pengadilan telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing menjadi Pegawai Bidang (Hawashid) yaitu menindaklanjuti Keputusan Ketua MA RI No. KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 3 bulan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lainnya maupun di lingkungan Pengadilan Agama sendiri.
6. Turut serta melakukan pembauran sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (blue print) yang dibuat oleh Mahkamah Agung
7. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini, Pengadilan Agama Surakarta sudah mempunyai website (saman) dengan Home Page : [www.pa-sukuharjo.go.id](http://www.pa-sukuharjo.go.id). Selain sebagai bentuk tindak lanjut pembauran MARI, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 berupa Transparansi Peradilan, serta membantu kelancaran tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dapat tercapai.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Surakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis  
Akuntansi:

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Surakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar:

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memesukikan setiap pos dalam laporan

**Pengukuran**

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Surakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pre-ops laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan Akuntansi**

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dan Pengadilan Agama Surakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-  
LRA**

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membatukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-  
LO**

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkanya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membatukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber



pendapatan

Belanja

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban: terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset**

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Inventari Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan masalah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhutang sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhutang sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhutang sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Penyesuaian dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan biring bercetak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan EMN/BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

##### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dilaporkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gandi Ragi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (komitman), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Neraca

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali*

### **(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash to cash account* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Surakarta mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 4 kali.

Realisasi

Pendapatan

Rp 0,-

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0,- atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0,-. Pendapatan Pengadilan Agama Surakarta yaitu Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja

Negeri

Rp5.066,164,600,-

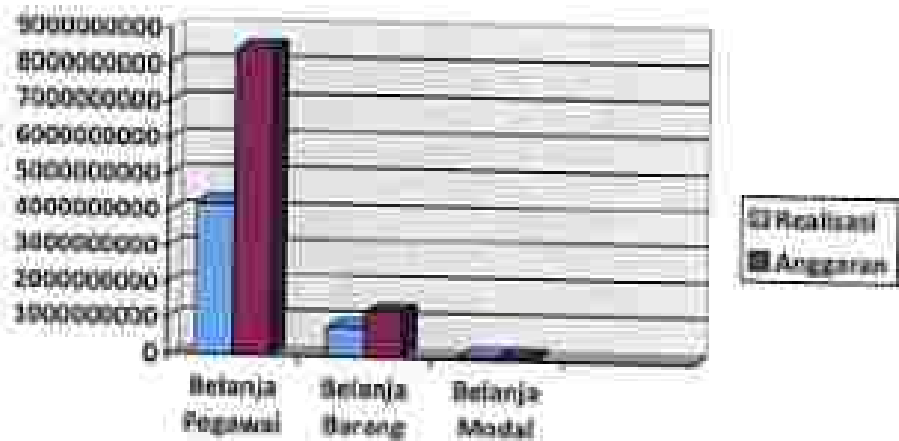
**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Surakarta pada Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 5.066,164.600,- atau 51,89 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 9.763.975.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2022**

Uraian	tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	1.412.655.000	4.202.571.400	29
Belanja Barang	1.240.317.000	752.022.142	60
Belanja Modal	44.005.000	14.000.000	100
Total Belanja Pokok Pengeluaran	2.700.975.000	5.018.594.542	44
Jumlah	1.762.975.000	5.980.164.600	34

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NIU (%)
Belanja Pegawai	4.209.531.498	-	-
Belanja Barang	792.633.162	-	-
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.002.164.660</b>	-	-

Belanja Pegawai  
 Rp 4.209.531,498

### B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4.209.531,498,- dan Rp 0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAC (TURUN) %
Belanja gaji dan tunjangan PNS	1.208.871.842	-	48,78
Belanja gaji dan tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja honorarium	-	-	-
Belanja lembur	-	-	-
Belanja pensiun	-	-	-
Jumlah Belanja Tetap	-	-	-
Pengembangan Sumber Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	1.208.871.842	-	-

Belanja Barang  
 Rp. 792.633.162,-

**B.3 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 792.633,162,- dan Rp. 0,-.

Belanja Modal  
 Rp. 64.000.000,-

**B.4 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar 64.000.000,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal  
 Peralatan dan  
 Mesin Rp 0,-

**B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 0,-.

**C. PERJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Kas di  
 Bendahara  
 Pengeluaran

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 desember 2022 dan 2021

Rp. 0

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari visa LPTUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal rencana. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Persediaan**

Rp 14,387,614,-

### C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 14,387,614,- dan Rp 0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

**Tanah**

Rp.

16,329,654,000,-

### C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Surakarta per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 16,329,654,000 dan Rp 16,329,654,000, tidak ada Kenaikan nilai aset tetap Tanah.

**Peralatan dan**

**Mesin Rp.**

2,169,071,805

### C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 2,169,071,805 dan Rp. 2,169,071,805,-.

**Gedung dan**

**Bangunan**

### C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 2021

Rp. 3.429.403.450,- adalah Rp. 3.429.403.450,- dan Rp. 3.052.049.000,-.

Jalan, Jaringan  
 dan Irigasi  
 Rp. 0,-

**C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Aset Tetap  
 Lainnya  
 Rp. 12.413.389,-

**C.7 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp 12.413.389 dan Rp 12.413.389.

Akumulasi  
 Penyusutan  
 Aset Tetap  
 Rp 2.372.231,751

**C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. 2.372.231,751 dan Rp. 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perkiraan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.959.271.955	1.668.272.600	290.999.355
2	Gedung dan Bangunan	3.429.403.450	379.488.918	3.050.014.532
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	12.413.389	5.400.000	7.013.389
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>5.018.808.844</b>	<b>2.372.231,751</b>	<b>2.646.577.093</b>

Aset Tak  
 Berwujud

**C.10 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 4.900.220 dan Rp. 4.900.220. Aset Tak Berwujud

Rp 4.900.220,- merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan diukur, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tidak ada Mutasi pada Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-Lain  
Rp 0,-

### C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2021
Mutasi Tambah:
- reklasifikasi dari aset tetap
Mutasi Kurang:
- penghapusan kembali BMN yang sehubungan
- penghapusan BMN
Saldo per 30 Juni 2022
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku per 30 Juni 2022

Tidak ada Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada periode pelaporan ini.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp  
4.900.220,-

### C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. 4.900.220,- dan Rp. 4.900.220,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atau penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dari manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari  
KPPN Rp  
45.000.000,-

#### C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persewaan (UP) atau Tambahan Uang Persewaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atas dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas  
Rp  
18.484.275.339,-

#### C.14 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.484.275.339,- dan Rp. 19.718.875.091,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Pendapatan  
PNBP  
Rp 0,-

### D. PERJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun  
 30 Juni 2022 dan 2021*

URAIAN	Tk2022	Tk2021	SAK (TURUN) %
PNSP Lainnya	-	491.000	100
<b>Jumlah</b>	-	<b>491.000</b>	<b>(100)</b>

*Beban Pegawai*  
 Rp 5.359.993.131

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada semester I Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.359.993.131,- dan Rp. 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipelajarikan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai smt I Tahun 2022 dan 2021*

URAIAN	Tk2022	Tk2021	SAK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban*  
*Persediaan*  
 Rp 14.387.614,-

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 14.387.614 dan Rp 0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk



Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2022	SIKIL (TUMBUH) %
Beban Persediaan Konsumsi			
Pemeliharaan			
Beban Persediaan Jasa Barang			
Beban Persediaan Lain-lain			
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Beban Barang  
 dan Jasa  
 Rp  
 528.374.095,-

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa semester I Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 528.374.095,- dan Rp 0,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban  
 Pemeliharaan  
 Rp 229.436.359

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan semester I tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 229.436.359,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban  
 Perjalanan  
 Dinas  
 Rp.  
 46,647,800,-

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas semester I Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 46,647,800,- dan Rp. 0,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022  
 dan 2021

Uraian dari Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Nilai (Rupiah)
Beban Perjalanan Dinas	46.647.800	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Perak Melay/Dalam kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Perak Melay/Luar Kota	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.647.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Surplus dari  
 Kegiatan Non  
 Operasional  
 Rp. 0,-

#### D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal  
 Rp.  
 19,718,875,091

#### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 19,718,875,091,- dan Rp 0,-.

Surplus/Defisit  
 LO Rp

#### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir

6,300,764,412 pada 31 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 6,300,764,412 dan Rp 0-. Surplus/Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**Koreksi Yang Menambah /Mengurangi Ekuitas Rp 0** **E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**  
Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada 30 Juni 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

**Ekuitas Akhir Rp 16,484,275,339** **E.11 Ekuitas Akhir**  
Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 16,484,275,339.- dan Rp0.-

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah periode pelaporan ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Untuk Periode Pelaporan ini Pengadilan Agama Surakarta tidak ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### **F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada periode pelaporan ini.

#### **F.2.3 Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Surakarta adalah :

- Nama Rekening : BPG 028 MANAGEMEN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA, Nomor Rekening : 651544011801000 pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Surakarta Sudirman.

#### **F.2.4 Revisi DIPA**

Selama Semester I Tahun 2022 ini Pengadilan Agama Surakarta melakukan revisi DIPA 01 sebanyak 4 kali.

#### **F.2.5 Ralat SPM, SSEP, dan SSPB**

Tidak terdapat Ralat baik itu SPM, SSEP maupun SSPB pada periode Pelaporan ini.

#### **F.2.7 Catatan Penting Lainnya**

Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta ditunjuk oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pengguna Anggaran

melalui Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja DI Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya, Nomor : 63/PA/BK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021. Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Surakarta menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Awal Tahun Nomor : W11-A31/105/KU.01/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penganggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengelola PNBK dan Staf Pengelola / PPABP Pengadilan Agama Surakarta ( Satker 401180) Tahun Anggaran 2022. Dengan susunan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Indra Perdana, S.Kom
Pejabat Penandatanganan Penguji SPM	/:	Anibang Cahyo Wibowo, S.E., M.Si
Bendahara Pengeluaran	:	Endang Dwi Purwanti, A.Md., S.H.
Bendahara Penerimaan	:	Anang Asbani Romdhoni, S.Kom.
Staf Pengelola / PPABP	:	Dewi Zahrotun Nisa, A.Md.

Selubungan dengan adanya mutasi pegawai, dibentuk Tim Pengelola DIPA sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Nomor : W11-A31/1255/KU.01/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penganggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengelola PNBK dan Staf Pengelola /

PPABP Pengadilan Agama Surakarta ( Satker 401180) Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Sambudi, S.Ag., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Indra Permana, S.Kom
Pejabat Penandatangan Penguji SPN	/:	Asia Fuwadah, S.H.
Bendahara Pengeluaran	:	Endang Dwi Purwanti, A.Md., S.H.
Bendahara Penerimaan	:	Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng.
Staff Pengelola / PPABP	:	Dewi Zahrotun Nisa, A.Md.

## VELAMPIRAN DAN DAFTAR



**PENGADILAN AGAMA KELAS IA SURAKARTA**  
Jl. Veteran No. 273 Telp: (0271) 636270 Fax: (0271) 643643  
Surakarta - Jawa Tengah 57155  
pa-surakarta.go.id e-mail: pasurakarta@gmail.com

**BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN  
KANTOR PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022  
DIPA BUA (01) KODE SATKER 401100  
Nomor : W11-A31/2121a/PL.03/V/2022**

Pada hari ini, Rabu Tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2022, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ana Firdah, S.H.  
NIP : 19791226 200604 2 003  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Nama : Dewi Zahrotun Nisa, A.Md.  
NIP : 19930115 202012 2 006  
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik (Stock Opname) Barang Persediaan dalam rangka Pemeriksaan Barang Persediaan Semester I Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut (Rincian Lembar Hasil Opname Fisik Terlampir):

**LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA**

Aksi Neraca		Nilai
Kode	Uraian	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2.945.276
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	0
117131	Pita Cetak, Materai dan Leges	0
Total		2.945.276

Demikian Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan ini di buat sebagai dasar nilai barang persediaan pada laporan Pemeriksaan, yang selanjutnya digunakan sebagai liaban

untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat cq. Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Surakarta.

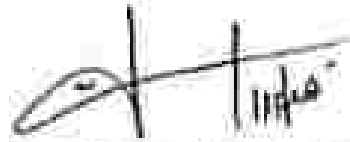
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:



Arie Pausalah, S.H.  
NIP. 19791226 200604 2 003

Operator Persediaan:



Dewi Zahrotun Nisa, A.Md.  
NIP. 19930115 202012 2 006



Mengetahui,  
Kepala Pengadilan Agama:

Ruhbadi, S.A., M.Si  
NIP. 19520322 199003 1 003



LAPORAN HASIL OPRAME FISIK BARANG PERSEDIAAN

SEMESTER I TAHUN 2022

Kode	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Per 30 Juni 2022 (Rp.)
117111	Barang Konsumen		
1010301001	Alat Tulis		596.250
000002	Ballpoint Penthel	2	209.000
000004	Ballpoint Snowmann	20	71.000
000006	Isi Ballpoint Penthel	10	264.000
000009	Spidol Snowmann ( Besar )	5	52.250
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel		141.900
000001	Tinta Stempel Tintes	2	24.200
000002	Tinta Stempel Bantol	2	99.000
000003	Stempad	2	18.700
1010301003	Penjepit Kertas		74.250
000001	Staples HD-10 (Kecil)	5	74.250
1010301004	Penghapus/ Korektor		80.000
000004	Penghapus Papan Tulis	8	80.000
1010301006	Ordner dan Map		449.550
000001	Map Kertas	90	449.550
1010302001	Kertas HVS		1.221.000
000001	HVS Folio 70 gr	10	495.000
000002	HVS A4 70 gr	15	726.000
1010302004	Amplop		242.526
000001	Amplop Dinas Kecil	1	1.320
000002	Amplop Dinas Tonggong	1	50.000
000003	Amplop Dinas Besar	1	195.406
000005	Amplop Merpati Tonggong	2	37.400
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan		
117114	ING CUKAI, Material dan Loges		

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2022**  
**(DALAM RUPIAH)**

Revisi Laporan : 00000  
 Tanggal : 29/06/2022  
 Halaman : 11

KELENTERAN NEGARA/LEMBAGA	000	MAHOMAH AGUNG
ESELON I	001	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DIVISI/SEKTOR/LOKASI	0000	Salah Damar
SATUAN KERJA	001100	PENGADILAN AGAMA SURABAYA
JENIS KETERANGAN	00	Kantor Depan

NAMA PERIBWAAN	JUMLAH
1	2
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Revisi Bersifat Pengukuran	
Persediaan	48.000.000
<b>Jumlah ASET LANCAR</b>	<b>48.000.000</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah	
Pemilikan dan Sewa	11.329.054.000
Merkahan Penyusutan Pemilikan dan Sewa	2.109.071.000
<b>Pemilikan dan Sewa (Neto)</b>	<b>9.219.983.000</b>
Gedung dan Bangunan	280.000.000
Merkahan Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.420.000.000
<b>Tanah dan Bangunan (Neto)</b>	<b>-239.999.999</b>
Aset Tetap Lainnya	3.000.000.000
Merkahan Penyusutan Aset Tetap Lainnya	17.413.000
<b>Aset Tetap Lainnya (Neto)</b>	<b>2.982.587.000</b>
<b>Jumlah ASET TETAP</b>	<b>7.962.570.000</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>10.000.000.000</b>
Aset Tak Berwujud	
Merkahan Amortisasi Aset Lainnya	1.000.000
<b>Jumlah ASET LAINNYA</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Jumlah ASET:</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Mang Harus Dibayar Kembali	
Mang Yang Belum Dipecahkan	1.100.000.000
Mang Murni KPR	10.000.000
<b>Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.100.000.000</b>
<b>Jumlah KEWAJIBAN</b>	<b>11.100.000.000</b>
<b>EKUITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
<b>Jumlah EKUITAS</b>	<b>10.400.000.000</b>
<b>Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>10.400.000.000</b>
	<b>79.738.054.000</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022  
(DALAM RUPIAH)**

Revisi Lembar : 0000011  
Tanggal : 29-08-2022  
Halaman : 1

KEBANTUAN NEGARA LEMBAGA	300	MANIKAMAL AGUNG
ESKORON 1	01	BIDAN ULUHAN ADMINISTRASI
WILAYAT/KOTA/KABUPATEN	0000	Rantor (Jawa)
SATUAN KERJA	48150	PERGADILAN AGAMA SUMBAWA
JENIS KETERANGAN	30	Kantor Pusat

NAMA PERUBAHAN	JUMLAH
1	2
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	
Penerimaan Pajak Penghasilan	
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak daan Sempit Moesat	0
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Penerimaan Das Perumahan dan das Tanah dan Bangunan	0
Penerimaan Das	0
Penerimaan Pajak Lainnya	0
Penerimaan Das Solut	0
Penerimaan Das Kotor	0
Jumlah Penerimaan Pajak	0
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	
Penerimaan Solut Daya Apas	
Penerimaan Solut Perumahan dan Loto	0
Penerimaan Solut Solut Pajak Lainnya	0
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
<b>PENDAPATAN Hibah</b>	
Penerimaan Hibah	
Jumlah Penerimaan Hibah	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)</b>	<b>0</b>
<b>KEBIAYARAN OPERASIONAL</b>	
Saluran Pegawai	
Saluran Perumahan	(6.300.000,00)
Saluran Barang dan Jasa	(11.300.000,00)
Saluran Perumahan	(200.000,00)
Saluran Perumahan Das	(200.000,00)
Saluran Barang Untuk Disediakan Kepada Masyarakat	(4.000.000,00)
Saluran Gaji	0
Saluran Solut	0
Saluran Hibah	0
Saluran Bantuan Sosial	0
Saluran Masyarakat dan Masyarakat	0
Saluran Perumahan Peningkat Tak terduga	(200.000,00)
Saluran Transfer	0
Saluran Lain-Lain	0
<b>JUMLAH KEBIAYARAN OPERASIONAL (B)</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C) (A-B)</b>	<b>0</b>
<b>KEBIAYARAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>	
Penerimaan (Pengeluaran) Aset non Lancar	0

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022**  
**(DALAM RUPIAH)**

Periode: **NOVEM**  
 Tanggal: **28-06-2022**  
 Halaman: **2**

KELOMPOK/LEMBAGA : OS	MINIKAWAH ADUNG
ESELON : 01	SACAN URUSAN ADMINISTRASI
PELAYANAN : 000	Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 40110	PENDAPILAN ADAM SURAKARTA
JOB KEYWORDING : 00	Kantor Daerah

NAMA PERIKHAAN	JUMLAH
1	2
Beban Persewaan Alat Non Lulus	0
Jumlah Surplus (Defisit) Persewaan Alat Non Lulus	0
<b>SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>
Beban Persewaan Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyusutan Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAIBNYA</b>	<b>0</b>
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SELAIN POS LUAR BASA (E - D)</b>	<b>0</b>
<b>POS LUAR BASA</b>	<b>(E - D) / (F - D)</b>
Pendapatan Luar Basa	0
Beban Luar Basa	0
Jumlah Pos Luar Basa (F)	0
<b>SURPLUS (DEFISIT) L.O (E + F)</b>	<b>0</b>

(K-100.004.12)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022  
(DALAM RUPIAH)**

Kode Lap : LRA02  
Tanggal : 29-06-2022  
Minitak : 1  
Page No : 1/1

KEMENTERIAN / LEMBAGA  
SISDIKON 1  
PELAYAN HUKUM  
SATUAN KERJA  
JURUSAN KEVIGAWASAN

500 KEMENTERIAN AGRI  
01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
020 Kantor Daerah  
001100 PENGADILAN AGAMA DIRIGENTIS  
001 Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (DIWAJIB) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN Hibah				
A.1	PENDAPATAN NEGARA DAN Hibah	0	0	0	-
A.1.1	Penerimaan Dalam Negeri	0	0	0	-
A.1.1.1	Penerimaan Pajak	0	0	0	-
A.1.1.2	Penerimaan Perizinan Negara Dalam Negeri	0	0	0	-
A.1.1.3	Hibah	0	0	0	-
	<b>Jumlah PENDAPATAN (SEM BERSAMA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B	BELANJA NEGARA				
B.1	BELANJA TRANSKAPITAL	4.793.873.000	5.086.764.800	10.617.810.300	22,13
B.1.1	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.1	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.2	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.3	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.4	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.5	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.6	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.7	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.8	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.9	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.10	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.11	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.12	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.13	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.14	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.15	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.16	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.17	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.18	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.19	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.20	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.21	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.22	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.23	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.24	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.25	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.26	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.27	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.28	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.29	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.30	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.31	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.32	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.33	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.34	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.35	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.36	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.37	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.38	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.39	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.40	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.41	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.42	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.43	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.44	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.45	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.46	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.47	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.48	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.49	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.50	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.51	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.52	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.53	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.54	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.55	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.56	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.57	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.58	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.59	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.60	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.61	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.62	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.63	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.64	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.65	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.66	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.67	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.68	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.69	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.70	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.71	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.72	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.73	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.74	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.75	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.76	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.77	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.78	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.79	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.80	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.81	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.82	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.83	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.84	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.85	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.86	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.87	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.88	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.89	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.90	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.91	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.92	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.93	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.94	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.95	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.96	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.97	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.98	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.99	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.1.1.100	Bantuan Sosial	0	0	0	-
	<b>Jumlah BELANJA NEGARA</b>	<b>4.793.873.000</b>	<b>5.086.764.800</b>	<b>10.617.810.300</b>	<b>22,13</b>
C	PEMBAYARAN				
C.1	PEMBAYARAN DALAM NEGERI (MEND)	0	0	0	-
C.1.1	Pembayaran Dalam Negeri	0	0	0	-
C.1.2	Hibah Pemerintah Dalam Negeri (Mend)	0	0	0	-
C.2	PEMBAYARAN LUAR NEGERI (MEND)	0	0	0	-
C.2.1	Pembayaran Luar Negeri	0	0	0	-
C.2.2	Pembayaran Luar Negeri	0	0	0	-
	<b>Jumlah PEMBAYARAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT BATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Lap: **TINGKAT BATUAN**  
 Tanggal: **29-08-2022**  
 Nomor: **1**

KEMENTERIAN KEMENDUDA  
 KELAS 1  
 WILAYAH PERANGKAP  
 SATUAN KERJA  
 JEPRE KEMERINDAHAN

002 AMPEKAMBAI KALING  
 01 BAKTI UNDAK ADMINISTRASI  
 090 Kantor Daerah  
 40708 PENGELOLAAN AGAMA SUKAWATI  
 42 Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KEMERINDAHAN (PERSENTISAN)	
		30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
1	Ekuitas Awal	15.716.873,291	0	15.716.873,291	-
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	(5.380.794,412)	0	(5.380.794,412)	-
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENURUNKAN EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KEMULATIF PERUBAHAN METODAK AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.1	Korupsi dan Mita Ases	0	0	0	-
3.2	Korupsi dan Penyalahgunaan	0	0	0	-
3.3	Korupsi dan Kecurangan	0	0	0	-
3.4	Salah Pengukuran Jasa Tetap	0	0	0	-
3.5	Korupsi dan Mita Ases Lainnya	0	0	0	-
3.6	Korupsi Lainnya	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5.800.194,880	0	5.800.194,880	-
5	KERANIAN PENURUNAN EKUITAS	(7.224.509,742)	0	(7.224.509,742)	-
6	Ekuitas Akhir	13.112.278,429	0	13.112.278,429	-

